**Analisis Terhadap Dampak dari Denuklirisasi Antara Korea Utara dengan Amerika Serikat Terhadap Perdamaian Dunia dengan Perspektif Liberalisme**

**Salsabila Dewi Putri**

**NIM: 071811233036**

Hubungan Internasional, FISIP

Universitas Airlangga, Surabaya

Amerika Serikat dengan Korea Utara diketahui memiliki hubungan yang kurang baik. Hal ini dilatar belakangi oleh terbelahnya Semenanjung Korea karena kalahnya Jepang pada Perang Dunia II. Korea terbagi menjadi dua, dimana bagian Selatan diambil alih oleh Amerika Serikat dan bagian Utara didukung oleh Uni Soviet. Pada tahun 1950, Korea Utara dengan bantuan China menyerang Korea Selatan. Namun dengan kerjasama bersama Amerika Serikat , Seoul berhasil diambil kembali oleh Korea Selatan. Hingga pada Juli 1953, terjadi gencatan senjata yang telah ditandatangani oleh Korea Selatan maupun Utara (Wadrianto, 2017). Disitu pula awal munculnya pemberian sanksi oleh Washington terhadap Pyongyang. Sempat terjadi pula penangkapan kapal perang Amerika Serikat Pueblo oleh Korea Utara. Diduga kapal tersebut melanggar daerah teritorial Korea Utara, namun Amerika Serikat menyangkal hal tersebut. Korea Utara juga sempat menembak jatuh pesawat pengintai milik Amerika Serikat (Wadrianto, 2017). Korea Utara pada Oktober 1994 pernah melakukan pembekuan dan pembongkaran program nuklir militer mereka dengan imbalan berupa pembangunan reaktor sipil. Washington mengurangi sanksi terhadap Pyongyang karena Kim Jong Il menunda uji coba rudalnya. Di tahun 2002, Pyongyang mendapat julukan “poros kejahatan” oleh Amerika Serikat karena Pyongyang dituduh melakukan program pengayaan uranium rahasia (Wadrianto, 2017). Hal ini dianggap melanggar kesepakatan nuklir tahun 1994. Korea Utara menjadi salah satu negara dalam daftar hitam negara-negara sponsor terorisme milik Amerika Serikat sejak tahun 1987, kemudian Amerika Serikat menghapus Korea Utara dari daftar tersebut sebagai bentuk respon dari kontrol instalasi nuklir Pyongyang.

Kemudian berlanjutlah perseteruan antara Korea Utara dan Amerika Serikat hingga kedua negara tersebut dipimpin oleh Kim Jong Un dan Donald Trump. Presiden Amerika Serikat—Trump—mengatakan bahwa ia tidak akan mengizinkan Korea Utara untuk mengembangkan nuklir yang sekiranya mampu mencapai wilayah Amerika Serikat. Disisi lain, Korea Utara melakukan uji coba rudal balistik antar benua dan Kim Jong Un pun menyatakan bahwa seluruh wilayah Amerika Serikat telah berada di dalam jangkauan ICBM Korea Utara (Wadrianto, 2017). ICBM adalah *Intercontinental Ballistic Missile*, dimana peluru balistik ini mempunyai jangkauan hingga 5.000-12.000 kilometer dan peluru ini dapat membawa senjata nuklir. Pada 2017 kemarin, Trump sempat mengancam bahwa Amerika Serikat akan memerangi Korea Utara dengan penuh kemarahan apabila Korea Utara tetap mengancam Amerika Serikat dengan peluru balistik mereka. Pyongyang merespon hal tersebut dengan mengancam untuk melepaskan rudal ke perairan dekat Guam, tempat pangkalan militer Amerika Serikat berada. Trump semakin berang karena Korea Utara melepaskan rudal balistik mereka ke Jepang, dan Trump juga memastikan bahwa diplomasi bukan lagi pilihan yang dapat ditempuh Amerika Serikat (Wadrianto, 2017). Korea Utara juga menyebut Amerika Serikat sebagai akar dari semua permasalahan karena pihak Amerika yang tidak mau menghentikan kebijakan bermusuhan dengan Korea Utara (Hutapea, 2017). Trump terdengar tidak konsisten ketika ia mengatakan tentang kemungkinan konflik dengan skala besar dengan Korea Utara, namun ia kemudian mengubah nada bicaranya dan mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Kim Jong Un selaku Presiden Korea Utara apabila kondisinya sudah memungkinkan.

Pada tahun 2018, terjadi peristiwa yang dianggap akan membawa perdamaian dunia menjadi lebih nyata dan lebih dekat. Terjadi pertemuan antara Donald Trump dengan Kim Jong Un di Singapura, dimana kedua belah pihak menandatangani perjanjian ‘komprehensif’. Dalam perjanjian tersebut Korea utara tetap berkomitmen untuk menyelesaikan denuklirisasi di Semenanjung Korea, dan Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan kepada Korea Utara dalam rangka denuklirisasi. Kedua negara ini mengupayakan perdamaian abadi terutama di Semenanjung Korea, membangun hubungan Korea Utara dengan Amerika Serikat yang belum pernah terjadi sebelumnya (VOA, 2018). Pada awal tahun ini, tepatnya pada 28 Februari 2019 terjadi pertemuan kedua antara Donald Trump dengan Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam dalam rangka membahas kembali denuklirisasi Korea Utara yang belum tuntas dibahas. Namun, pada pertemuan ini masih belum ada kejelasan mengenai denuklirisasi Korea Utara. Hal ini disebabkan Korea Utara yang menginginkan agar sanksi-sanksi mereka dihapuskan, namun Amerika Serikat tidak bisa melakukan hal tersebut sehingga Trump mengatakan bahwa ia menghindari pembicaraan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembicaraan mengenai denuklirisasi ini menemukan jalan buntu, namun Trump dan Kim akan berusaha menyelesaikan permasalahan ini. Kim menyatakan bahwa ia menginginkan adanya perdamaian yang nantinya bisa ia wariskan pada anak-anaknya (Perdana, 2019).

Fenomena ini dapat dilihat melalui pandangan perspektif liberalisme, karena dari uraian singkat diatas secara garis besar terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam hubungan Korea Utara dengan Amerika Serikat. Apabila sebelumnya hubungan yang terjalin antara kedua negara tersebut bersifat konfliktual, berbeda dengan sekarang yang bisa dikatakan lebih kearah kooperatif. Meskipun masih banyak tindakan Korea Utara yang dianggap tidak berubah dari sebelumnya, namun kemauan Kim dalam menemui Trump untuk kedua kalinya dapat diapresiasi. Dari sini dapat dilihat tindakan yang dilakukan oleh Kim sesuai dengan argumen Locke yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya (Conolly, *n.d*). Hal ini juga diperjelas dengan adanya prinsip *rule of law* dimana negara akan menghormati negara lain dan dalam pola interaksinya menekankan norma saling percaya (Jackson & Sorensen, 1999). Saling percaya inilah yang menjadi fondasi kuat yang dianggap mampu menghindarkan negara-negara dari konflik. Dengan menekankan prinsip *rule of law* juga akan menimbulkan respek tinggi terhadap aktor lain—negara maupun institusi internasional—agar tidak memaksakan kehendak pemerintah negara lain. Jankowiak (*n.d*) juga percaya bahwa respek terhadap hukum merupakan jalan menuju perdamaian.

Amerika Serikat sebagai negara liberal, wajar apabila ia mengedepankan kerjasama sebagai bentuk interaksinya. Berbeda dengan Korea Utara yang notabene negara komunis, namun sikap Kim Jong Un yang mau menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat menunjukkan bahwa manusia memang secara alamiah memiliki moral yang baik. Langkah yang diambil Kim Jong Un membuktikan adanya kemajuan—dimana munculnya keinginan untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik (Dugis, 2018). Bentuk kerjasama ini merupakan bukti rasionalitas yang dimiliki manusia, kedua belah pihak memilih jalur denuklirisasi karena dengan jalur ini memang kesejahteraan dan keamanan masyarakat akan lebih terjamin.

Sikap Kim Jong Un dimana ia menuntut pengurangan sanksinya pada Amerika Serikat tidak dapat disalahkan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa manusia akan bertindak rasional dengan cara memaksimalkan kepentingannya (Sweet, *n.d*). Korea Utara berusaha meraup keuntungan semaksimal mungkin dari perjanjian ini, karena ia telah berusaha mengurangi ancaman nuklirnya dimana hal tersebut merupakan keunggulan Korea Utara selama ini. Sebenarnya usaha Korea Utara dalam mencapai perdamaian dapat dilihat sejak tahun 1994, dimana ia mendapatkan pengurangan sanksi dari Washington karena menunda jadwal uji coba nuklir. Hal ini membuktikan bahwa pemimpin Korea Utara memiliki *morally* *good*, dan hal ini dikarenakan terorganisir oleh mekanisme komunikasi yang baik pula (Weber, 2005). Amerika Serikat menolak mencabut sanksi Korea Utara karena mereka menginginkan Korea Utara untuk melakukan denuklirisasi secara total terlebih dahulu, baru kemudian Amerika Serikat akan mengurangi sanksi Korea Utara.

Kesimpulan dari fenomena ini adalah perjanjian komprehensif yang dilakukan Korea Utara dengan Amerika Serikat terjadi karena manusia yang memang pada dasarnya memiliki sifat baik, dimana mereka mengedepankan kerjasama dan berusaha menghindari konflik. Selain itu, Kim dan Trump sudah melakukan langkah yang tepat karena mereka menghindarkan rakyatnya dari kemungkinan perang—dimana hal tersebut memang kewajiban seorang pemimpin. Amerika Serikat dengan Korea Utara yang memertahankan pendirian masing-masing dalam masalah sanksi membuktikan bahwa kedua belah pihak tidak ada menginginkan adanya kerugian nantinya. Rasa optimisme kedua belah pihak terhadap satu sama lain akan komitmen setiap pihak menunjukkan pula bahwa Trump dan Kim memiliki rasionalitas manusia. Korea Utara dan Amerika Serikat disini telah berusaha memberikan ‘sedikit’ jaminan keamanan pada dunia, terutama Semenanjung Korea, agar tercapainya perdamaian dunia.

**Referensi:**

Abrams, Abigail. 2019. 4 Bukti Korea Utara Belum Penuhi Janji Denuklirisasi sejak KTT Singapura [online]. Dalam https://www.matamatapolitik.com/listicle-4-bukti-korea-utara-belum-penuhi-janji-denuklirisasi-sejak-ktt-singapura/ [Diakses pada tanggal 7 Juni 2019]

Conolly, PJ. (*n.d*). John Locke (1632-1704), *Internet Encyclopedia of Philosophy: A Peer—Reviewed Academic Resource*, tersedia dalam http://www.iep.utm.edu/locke/

Hutapea, Rita Uli. 2017. Korut Sebut AS Akar Penyebab Semua Masalah [online]. Dalam https://news.detik.com/internasional/d-3506913/korut-sebut-as-akar-penyebab-semua-masalah [Diakses pada tanggal 7 Juni 2019]

Jackson, R & Sorensen, G. 1999. *Introduction to International Relations*. Oxford University Press.

Jankowiak, T. (*n.d*). Imanuel Kant, *Internet Encyclopedia of Philosophy: A Peer—Reviewed Academic Resource*, tersedia dalam http://www.iep.utm.edu/kantview/#SH6c

Perdana, Agni Vidya. 2019. Kim Jong Un Disebut Ingin Denuklirisasi Korea Utara demi Anak-anaknya [online]. Dalam https://internasional.kompas.com/read/2019/02/24/19370501/kim-jong-un-disebut-ingin-denuklirisasi-korea-utara-demi-anak-anaknya [Diakses pada tanggal 7 Juni 2019]

Prima, Wirayani. 2019. Buntu, Trump & Kim Tak Sepakat Soal Sanksi & Denuklirisasi [online]. Dalam https://www.cnbcindonesia.com/news/20190228145458-4-58164/buntu-trump-kim-tak-sepakat-soal-sanksi-denuklirisasi [Diakses pada tanggal 3 Juni 2019]

Sweet, W. (*n.d*). Jeremy Bentham (1748-1832), *Internet Encyclopedia of Philosophy: A Peer—Reviewed Academic Resource*, tersedia dalam http://www.iep.utm.edu/bentham

VOA. 2018. Trump: Kita Akan Denuklirisasi Korea Utara [online]. Dalam https://www.voaindonesia.com/a/trump-kita-akan-denuklirisasi-korea-utara/4435032.html [Diakses pada tanggal 7 Juni 2019]

VOA. 2018. Trump-Kim Tanda Tangani “Dokumen Komprehensif” [online]. Dalam https://www.voaindonesia.com/a/trump-kim-tanda-tangan-dokumen-komprehensif-/4434945.html [Diakses pada tanggal 3 Juni 2019]

Wadrianto, Glori K. 2017. 70 Tahun "Sejarah Panas" AS-Korut, dan Kini Berlanjut [online]. Dalam https://internasional.kompas.com/read/2017/09/04/09450941/70-tahun-sejarah-panas-as-korut-dan-kini-berlanjut?page=all [Diakses pada tanggal 2 Juni 2019]

Weber, C. 2005. *International Relations Theory, A Critical Introduction.* 2nd edition. Routledge.